

**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2011-2015**



Disusun Oleh:

Nama : Ayu Puspa Ningrum  
Nomor Mahasiswa : 14313068  
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
YOGYAKARTA  
2018**

**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2011-2015**



**SKRIPSI**

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar  
Sarjana jenjang Strata 1 Jurusan Ilmu Ekonomi, Pada fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Ayu Puspa Ningrum  
Nomor Mahasiswa : 14313068  
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
YOGYAKARTA  
2018**

#### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Maret 2018

Penulis,



Ayu Puspa Ningrum

**PENGESAHANSKRIPSI**

Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2011-2015

Oleh :

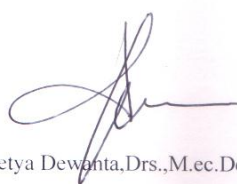
Nama : Ayu Puspa Ningrum

Nomor Mahasiswa : 14313068

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 13 Maret 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh Dosen Pembimbing

 Disetujui  
dusyika

Awan Setya Dewanta, Drs., M.ec.Dev.

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT TAHUN 2011-2015**

Disusun Oleh : **AYU PUSPA NINGRUM**

Nomor Mahasiswa : **14313068**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Jum'at, tanggal: 13 April 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Awan Setya Dewanta, Drs.,M.Ec.Dev.

Penguji : Sahabudin Sidiq, Dr., SE., MA.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

## MOTTO

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

Artinya :Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti

berperang di jalan Allah hinggapulang.  
(H.R.Tirmidzi)

زَنَّاحِلَ إِنْ اللَّهَ مَعَنَا

Artinya: JanganBersedihSesungguhnya Allah Bersama Kita.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan,"

(QS.94:5)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah serta kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.

Skripsi ini dipersembahkan penulis untuk :

**Keluarga Saya**, kedua orang tua, beserta keluarga dan adik saya yang tidak pernah lupa selalu memberi inspirasi dan motivasi.

1. ALLAH SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nyayang selalu ada di setiap langkahku dalam memberikan kekuatan, kemampuan dan menjaga etos perjuangan untuk dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan optimis.
2. Kedua orang tua saya, Danardono S.H dan Prihatin yang selalu memberikan semangat serta doa-doanya selama ini. Yang tidak pernah lelah memberikan nasehat, motivasi, perhatian dan pengertiannya selama ini.
3. Keluarga saya terutama tiga adik saya yang bernama Annisaa Nuraini, Difa Khairun Nisa Dan M. Akbar Malikusoleh dan Abang saya Nungroho Aji Wibowo yang selalu mendukung penulis.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirrabil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang berjudul "**Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2015**".

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1 pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Informasi yang disajikan dalam skripsi ini telah diusahakan sedemikian baik supaya pembaca dapat memahami isi dari skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya akan segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, baik kemampuan, wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang sangat berarti sehingga kesulitan yang ada dalam proses penyusunan skripsi ini dapat diatasi dengan baik. Melalui kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang secara langsung membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dan ucapan ini dihaturkan kepada:



1. Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan yang dilimpahkan-Nya kepada penulis selama menulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
2. Kedua Orangtuaku, Ayah dan Mama tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan maupun motivasinya selama perkuliahan ini, yang sudah mempercayai untuk bisa berkuliah di UII dan yang memfasilitasi segala kebutuhan dengan cukup. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT. Aamiin YRA. *Thanks a lot and I love you so much!*
3. Untuk yang selalu ada Adik kandung Annisaa Nuraini, Difa Khairun Nisa Dan M. Akbar Malik Soleh terimakasih sudah selalu memberikan do'a, perhatian dan pengertian kepada penulis, semoga kita bisa menjadi orang yang selalu bermanfaat untuk orang banyak. Aamiin YRA. *Be success and I love so much you are.*
4. Seluruh Keluarga besar Danardono S.H dan Prihatin, terimakasih atas semua doa dan semangat yang telah diberikan kepada penulis semoga selalu dimudahkan rezeki dan dilancarkan segala urusan. Aamiin YRA.
5. Bapak Awan Setya Dewanta, Drs., M. Ec. Dev. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terima kasih telah membimbing dan memberikan arahannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Ilmu-ilmu dan pengalaman yang Bapak berikan kepada penulis selama

menempuh jenjang Strata 1 juga dijadikan penulis sebagai bekal untuk kedepannya.

6. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, MS selaku mantan Rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dr. D Agus Hardjito, M.Si, CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, yang telah mengajarkan ilmu yang tidak ternilai, hingga penulis menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
9. Untuk sahabat saya selama masa perkuliahan Novi Dwi Andianti, Melawati Pustpita Dewi, Ira Yuliana Dewantari dan Fernanda Andharesta yang selalu ada disaat susah maupun susah, selalu memberikan nasehat disaat susah. Terimakasih banyak untuk semua kenangan yang sudah dilalui sukses selalu untuk kita semua.
10. Sahabat-sahabat SMA saya Nawang, Edy, Made, Kiki, Koko, Nizar, Hikmah, Meilita yang selalu memberikan motivasi terimakasih atas dukungan pengertian dan perhatian kalian dari jauh. I love you!
11. Keluarga IE 2014 yang selalu memberikan semangatnya dan berjuang bersama-sama. IE SATU IE SATU KELUARGA !
12. Dan akhirnya, semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang tulus dari semua pihak dapat diterima oleh Allah SWT serta mendapatkan pahala yang berlipat dari-Nya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu masih banyak kekurangan, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan skripsi atas skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Maret 2018

Penulis

Ayu Puspa Ningrum

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahaan .....	iv
Motto.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Grafik .....	xii
Abstrak.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	2
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
2.1. Kajian Pustaka .....	14
2.2. Landasan Teori .....	17
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi .....	17
2.2.2. Pembangunan Ekonomi .....	18
2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	20
2.2.4. Pengertian PDRB Per Kapita .....	21
2.2.5 Pengertian Ketimpangan .....	22

2.2.6 Pengertian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	24
2.2.7. Hubungan Variabel Independen dengan Variable Dependen .....	26
2.2.8. Kerangka Pemikiran .....	28
2.2.9. Hipotesis .....	29
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1. Variabel Penelitian .....	30
3.2. Definisi Operasional Variabel .....	30
3.2.1. Variabel Dependen .....	30
3.2.2. Variabel Independen .....	31
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	32
3.4. Metode Analisis Data .....	33
3.4.1. Metode Common Effects .....	33
3.4.2. Metode Fixed Effects. ....	33
3.4.3. Metode Random Effects .....	34
3.5. Pemilihan Model dalam Pengolahan Data .....	35
3.5.1. Uji Chow Test .....	35
3.5.2. Uji Hausman .....	35
3.5.3. Uji KoefisienDeterminasi ( $R^2$ ) .....	35
3.5.4. Uji F (Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama) .....	36
3.5.5. Uji T (Pengujian Variabel Secara Individu) .....	36
<b>BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1. Analisis Deskriptif .....	38
4.2. Pemilihan Model Regresi .....	43
4.2.1. Uji Chow .....	47

4.2.2. Uji Hausman .....	48
4.3. Analisis Regresi Linier Terpilih .....	49
4.3.1. Uji T (Uji Variabel Secara Individu) .....	52
4.3.2. Uji F (Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama) .....	55
4.3.3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	56
4.4. Hasil dan Pembahasan .....	57
4.4.1. Analisis Pengaruh PDRB terhadap ketimpangan Daerah .....	57
4.4.2. Analisis Pengaruh IPM terhdap Ketimpangan Daerah .....	58
4.4.3. Analisis Pengaruh TPT terhadap Ketimpangan Daerah .....	58
<b>BAB V: KESIMPULAN DAN IMPLIKASI .....</b>	<b>60</b>
5.1. Kesimpulan .....	60
5.2. Implikasi .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>

## **DAFTAR GRAFIK**

<b>Grafik 1.1</b> Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2015.....	6
<b>Grafik 1.2</b> IPM Provinsi Kalimantan Barat (Persen) Tahun 2011-2015.....	8
<b>Grafik 4.1</b> Perkembangan Ketimpangan Daerah di Kalimantan Barat Periode 2011 – 2015.....	41

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b> Ketimpangan Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat .....	39
<b>Tabel 4.2</b> Hasil Estimasi Model <i>Common Effect</i> .....	44
<b>Tabel 4.3</b> Hasil Estimasi Model <i>Fixed Effect</i> .....	45
<b>Tabel 4.4</b> Hasil Estimasi Model <i>Random Effect</i> . .....	46
<b>Tabel 4.5</b> Hasil Uji signifikansi <i>Fixed Effect</i> dan <i>Common Effect (Chow Test)</i> .....	47
<b>Tabel 4.6</b> Hasil Uji signifikansi <i>Fixed Effect</i> dan <i>Random Effect (Hausman)</i> .....	48
<b>Tabel 4.7.</b> Hasil Estimasi Regresi .....	49



## ABSTRAKSI

Ketimpangan regional merupakan permasalahan klasik yang sudah lama terjadi dan harus dihadapi secara serius dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat dan mengetahui ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan variable PDRB Per Kapita, IPM dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *cross section* dan *time series* yang biasanya disebut juga dengan data panel pada tahun 2011-2015. Metode analisis data panel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji signifikansi F, Hausman test dan uji T, Uji F dan R<sup>2</sup>.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan Indeks Williamson di Provinsi Kalimantan Barat masih tergolong rendah walaupun mengalami kenaikan setiap tahunnya. Variabel PDRB Per Kapita berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Variabel IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dan variable Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negative tetapi tidak signifikan.

**Kata Kunci:** *Indeks Williamson, PDRB Per Kapita, IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang memiliki 34 Provinsi, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk 255,461,700 juta jiwa pada tanggal 1 juli 2015. Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia masih memiliki masalah dalam pemerataan pembangunan. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung meningkat dan stabil. Tetapi pertumbuhan yang tinggi ini tidak diseimbangi dengan pemerataan yang menyebabkan ketimpangan sosial antar daerah dan antar pedesaan. Seharusnya pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan pembangunan ekonomi yang merata.

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat tidak selalu memberikan dampak positif terhadap pemerataan ekonomi, sebagian besar dampak yang diberikan oleh pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat yaitu semakin meningkatnya ketimpangan ekonomi yang terjadi. Fokus utama dari program pembangunan ekonomi yang terus meningkat, fokus lainnya dari pembangunan ekonomi yaitu menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran (Todaro dan Smith, 2006)

Usaha pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional Indonesia yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual pada hakikatnya yang bertujuan untuk terus meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu distribusi pendapatan yang merata, pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut bernilai positif, yang berarti kegiatan pada bidang ekonomi saat waktu tersebut mengalami perubahan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dan jika pada suatu waktu pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut bernilai negatif, yang berarti kegiatan ekonomi pada waktu tersebut mengalami perubahan penurunan pertumbuhan ekonomi.

Awal pembangunan Indonesia banyak mengalami hambatan dalam merealisasikan pembangunan yang merata di setiap daerah, beberapa daerah mengalami ketimpangan antar daerah misalnya beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan cepat, sementara di daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah yang mengalami pertumbuhan yang lambat disebabkan oleh karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki.

Lengsernya penguasa orde baru, Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998 menandai masuknya Indonesia ke dalam babak baru sejarah. Sistem pemerintahan yang berjalan secara sentralisasi selama 35 tahun adalah salah satu sumber masalah di negeri ini yang dengan sangat kuat muncul menjadi fokus perbincangan. Berbagai

sorotan tajam terhadap kelemahan sistem ini pada akhirnya bermuara pada wacana desentralisasi yang terus mengemuka. Akhirnya pada tanggal 7 Mei 1999, disahkanlah UU.No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah atau yang lebih populer dengan sebutan Undang-Undang Otonomi Daerah. Undang-Undang ini kemudian direvisi dengan diterbitkannya UU. No. 32 Tahun 2004 yang berisi Pemerintah Daerah menetapkan bahwa desentralisasi dengan penerapan Otonomi Daerah sudah tidak dapat ditunda lagi. Penerapan otonomi Daerah diharapkan menjadi salah satu jalan keluar dari disintegrasi yang dirasakan semakin menguat sebagai akibat dari kurang diperhatikannya daerah-daerah yang jauh dari pemerintah pusat.

Persoalan ketimpangan ekonomi sering terjadi pada negara yang sedang berkembang, ketimpangan ekonomi baik dari sisi ekonomi, pembangunan infrastruktur, fasilitas dan sarana publik bukan lagi hal baru. Persoalan ketimpangan sudah terjadi dari sejak awal pembangunan di Indonesia. Pemerintah sejak dulu sudah banyak melakukan perbaikan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan, perbaikan yang dilakukan mulai dari perbaikan jalan untuk melancarkan distribusi antar daerah, memperluas aliran listrik sampai ke daerah pelosok agar masyarakat di daerah pelosok dapat merasakan aliran listrik juga dan memasang jaringan telepon serta jaringan internet di kecamatan-kecamatan agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah dan agar setiap informasi dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Tetapi usaha perbaikan infrastruktur yang telah dilakukan oleh pemerintah tetap masih belum mampu memperbaiki ketimpangan ekonomi yang

terjadi. Ketimpangan dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan letak demografi yang dimiliki oleh setiap wilayah. Dengan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan letak demografi yang dimiliki oleh setiap wilayah oleh karena itu tidak heran bilamana terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Salah satu tolak ukurnya adalah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita regional berdasarkan nilai PDRB. PDRB adalah nilai suatu barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh faktor produksi yang dihasilkan suatu daerah periode waktu tertentu. PDRB perkapita adalah PDRB atasharga konstan di bagi seluruh jumlah penduduk pertengahan tahun.

Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terbagi menjadi 14 Kabupaten yang memiliki latar belakang perbedaan antar wilayah. Perbedaan yang dimiliki antara lain perbedaan karakteristik sumber daya alam, sosial, dan ekonomi di setiap Kabupaten/Kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan ekonomi di masing-masing wilayah.

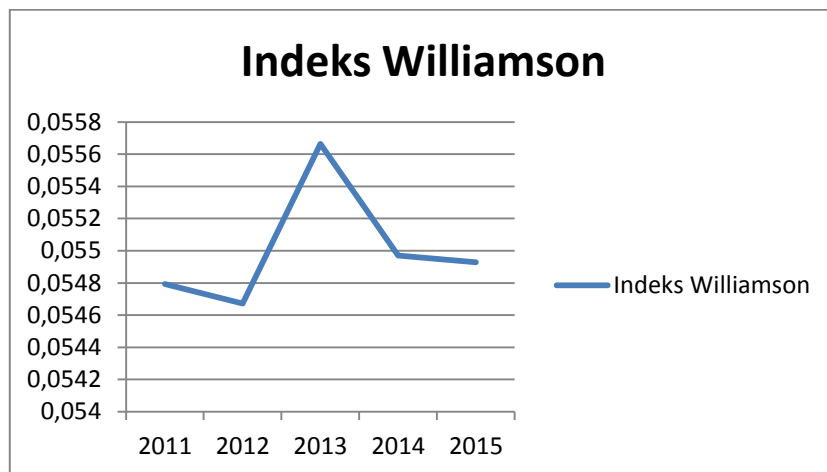
Dalam pembangunan ekonomi pasti mempunyai pro dan kontra dari masyarakat Kritik dan ketidakpuasaan yang timbul dalam proses pembangunan pada dasarnya muncul karena perkembangan pembangunan dengan pertumbuhan

ekonomi kurang mampu menciptakan pemerataan pembangunan di wilayah tersebut, akibat dari tidak adanya pemerataan pembangunan mengakibatkan ketimpangan pendapatan semakin besar dan menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya pengangguran, kurangnya meratanya sarana kesehatan dan pendidikan, kurangnya perumahan, kebutuhan pokok dan lain-lain.

Ketimpangan dapat ditunjukkan dengan melihat indeks ketimpangan williamson yang digunakan untuk memberikan gambaran kondisi dan perkembangan pembangunan daerah, dalam hal ini adalah Provinsi Kalimantan Barat dengan melihat tingkat pemerataan PDRB per kapita antar Kabupaten/Kota. Berikut ini indeks williamson Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011-2015

**Grafik 1.1**

**Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2015**

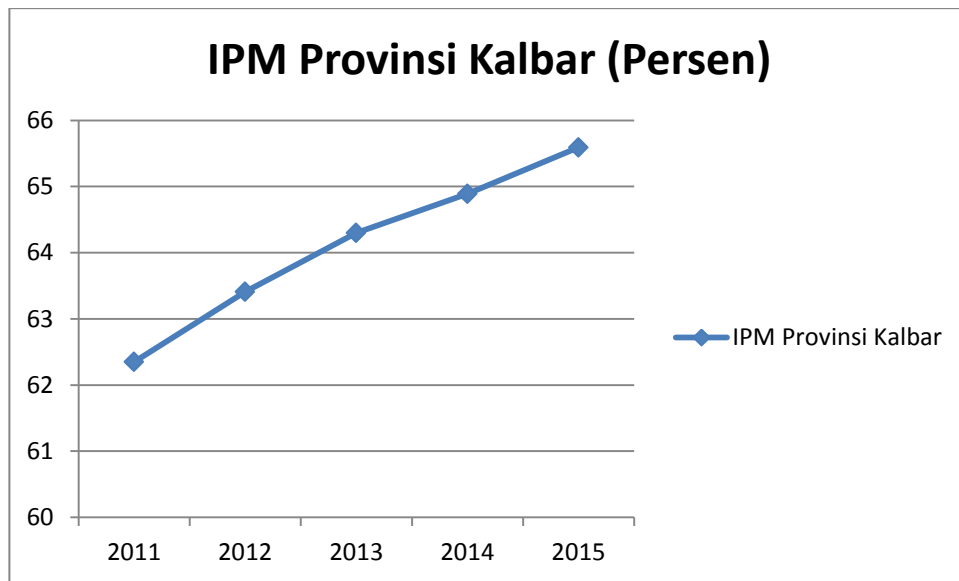


Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa rata-rata ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2011-2015 mengalami perubahan yang tidak terlalu signifikan. Ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2011 menunjukkan nilai indeks williamson sebesar 0.054793 dan naik menjadi 0.054671 pada tahun 2012. Begitu pula pada tahun-tahun berikutnya yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun.

Nilai Indeks Williamson di Provinsi Kalimantan Barat jika di perhatikan secara rata-rata tingkat PDRB per kapita antar wilayah memiliki tingkat ketimpangan yang relatif rendah. Hal ini diakibatkan karena pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah mengalami fluktuasi pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Ketimpangan dapat diakibatkan dari faktor perbedaan demografi salah satunya yaitu jumlah pengangguran terbuka yang ada di setiap wilayah yang ada di Kalimantan Barat. Tingginya angka pengangguran terbuka di setiap wilayah menunjukkan bahwa tidak meratanya pembangunan yang terjadi di setiap wilayah sehingga kurangnya tersedia lapangan pekerjaan yang dibutuhkan.

**Grafik 1.2**

**IPM Provinsi Kalimantan Barat (Persen) Tahun 2011-2015**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat

Dari Grafik 1.2 dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya mengalami kenaikan yang berarti bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas manusianya agar setiap tahunnya menjadi lebih baik lagi dengan harapan dapat memberikan kontribusi lebih dalam pengelolaan sumber daya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga memberikan manfaat bagi



kemajuan khususnya dalam kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.

Usaha pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dalam hal kesehatan, pendidikan, dan peningkatan pendapatan masyarakatnya dengan cara meningkatkan kualitas kesehatan dengan mempermudah akses kesehatan untuk masyarakatnya, meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu dan mempermudah akses untuk mendapatkan pendidikan layak, dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara memberikan pelatihan yang sesuai bagi masyarakat dan membuka lapangan kerja yang sesuai kemampuan masyarakatnya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut menjadi lambat antara lain letak demografi daerah tersebut, sumber daya alam yang dimiliki kurang, investor yang cenderung lebih tertarik berinvestasi pada wilayah yang memiliki prasarana atau fasilitas publik yang mudah diakses. Sehingga pada saat pertumbuhan ekonomi yang lambat menyebabkan ketimpangan pada wilayah tersebut karena pendistribusian yang tidak merata. Indeks Pembangunan Manusia juga dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya ketimpangan yang terjadi di suatu wilayah karena Indeks Pembangunan Manusia pada setiap wilayah berbeda-beda.

Alasan memilih ketimpangan di Provinsi Kalimantan untuk diteliti karena sebagian besar mahasiswa meneliti ketimpangan di Pulau Jawa sedangkan untuk di Pulau Kalimantan masih sedikit. Kemudian alasan lain Karena tingkat ketimpangan di Provinsi Kalimantan Barat termasuk tinggi urutan pertama untuk tingkat se Kalimantan berdasarkan data di Badan Pusat Statistik (BPS).

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Menganalisis bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Menganalisis bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat.

### **1.3 Tujuan Penelitian:**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pembangunan antar di Provinsi Kalimantan Barat.

2. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh IPM terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian:**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Instansi, Memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan Regulasi.
2. Bagi Penulis selanjutnya, Memberi manfaat bagi Ilmu Pengetahuan. Khususnya bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti kembali penelitian yang sama.
3. Bagi Peneliti, Dapat mengetahui masalah-masalah yang terjadi di lapangan, terkadang masalah yang terjadi di lapangan berbeda dengan teori-teori yang sudah di dapat dalam perkuliahan.

## **1.5 Sistematis Penulisan**

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I :           PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar belakang yang menjelaskan dasar penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang menjelaskan apa yang ingin peneliti teliti dan yang terakhir terdapat tujuan serta manfaat dari hasil penelitian.

Bab II :           KAJIAN PUSTAKA dan LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk memperkuat hasil teori yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya, kemudian pada bab ini menjelaskan teori-teori yang mendasari dari variable-variable dalam penelitian untuk menunjang dari hasil analisis yang akan dipaparkan pada bab IV.

Bab III:           METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data, metode pengumpulan data dan definisi operasionalnya untuk mencapai tujuan penelitian.

Bab IV:           HASIL ABALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan bagaimana proses dalam pengolahan dari setiap variable-variable yang digunakan dengan menggunakan metode yang sudah dipaparkan pada

bab III dan hasil analisis data yang telah didapatkan akan diinterpretasikan dan hasilnya akan dijelaskan.

#### Bab V:           SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan serta implikasi dan penelitian setelah dianalisis pada Bab IV.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kajian Pustaka

Sinaga (2010) melakukan penelitian tentang “ Analisis Ketimpangan Ekonomi antar Kabupaten/Kota dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya: Studi Kasus Provinsi Sumatera Selatan (2004-2007). Penelitian ini menggunakan metode data panel. Produk Domestik Regional Bruto per kapita menjelaskan bahwa rasio angka harapan hidup dan rasio angka melek huruf berhubungan positif terhadap Produk Domestik Bruto per kapita, sedangkan hubungan PAD dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB per kapita tidak signifikan. Dengan menggunakan data PDRB per kapita tanpa migas menjelaskan bahwa rasio angka harapan hidup dan pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita, sedangkan hubungan pendapatan asli daerah dan rasio angka melek huruf terhadap PDRB per kapita tidak signifikan.

Mopangga (2011) melakukan penelitian tentang “ Analisa Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo”. Analisis yang digunakan adalah indeks wiliamson, indeks gini, *shift share* dan tipologi klassen dengan menggunakan regresi dan data panel. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pendapatan per kapita, indeks pembangunan manusia dan rasio belanja infrastruktur. Hasil analisa dengan menggunakan model indeks wiliamson,

Produk Domestik Regional Bruto perkapita berpengaruh positif terhadap ketimpangan di Provinsi Gorontalo. Sedangkan menggunakan indeks gini, PDRB per kapita menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Sedangkan variabel IPM yang terdapat pada indeks gini dan indeks williamson berpengaruh positif terhadap ketimpangan di Provinsi Gorontalo. Indeks Pembangunan Manusia, rasio belanja, infrastruktur dalam indeks gini dan indeks williamson berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Harun (2012) melakukan penelitian tentang “ Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur” dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat analisis Indeks Williamson dengan metode regresi data panel dengan *Random Effect Model*. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota DI Provinsi Jawa Timur.

Dhyatmka (2013) melakukan penelitian tentang “ Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten pasca pemekaran, dengan alat analisis Indeks Williamson, Tipologi Klassen”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat analisis Indeks Williamson dan Tipologi Klassen dengan metode regresi data panel. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten mengalami peningkatan. Berdasarkan tipologi kelas, kota yang termasuk daerah maju dan cepat berkembang adalah kota Tangerang dan Cilegon. Hasil dari

analisis data panel dengan metode FEM, penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif, pengeluaran pemerintah (GE) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan dan sedangkan tingkat pengangguran (UE) tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten pasca pemekaran.

Ginting (2014) melakukan penelitian tentang “ Analisis Ketimpangan Pembangunan di Indonesia”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan ketimpangan antar wilayah di Indonesia dan menganalisis pengaruh variabel PDRB per kapita, investasi dan aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pada tahun 2004-2012 indeks wiliamson bagian timur lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia bagian barat. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia antara Indonesia bagian barat dan bagian timur masih terjadi ketimpangan.

Astuti (2015) melakukan penelitian tentang “ Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di DIY tahun 2005-2013, dalam penelitian ini didapatkan hasil pemanfaatan kekeayaan sumber daya alam yang dimiliki daerah ditunjukkan dengan variabel SDA tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Disebabkan DIY mengalami perubahan basis ekonomi atau mengalami pergeseran menuju sektor jasa dan niaga. Variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Disebabkan oleh usia harapan hidup yang dimiliki tinggi sehingga banyaknya usia npn-produktif yang tinggal di DIY, sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan



distribusi pendapatan. Variable PDRB perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Disebabkan adanya pergeseran basis ekonomi menuju sektor jasa dan niaga sehingga menyebabkan tingkat upah meningkat. Dan sedangkan variable jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY”.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Aryad (1999) Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi ekonomi suatu Negara yang berubah secara berkesinambungan dengan tujuan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Pengertian lain dari pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan kapasitas produksi dalam perekonomian yang berbentuk kenaikan pendapatan nasional. Menurut Kuznet dalam Pressman (2000) dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perpaduan dari tingkat produktivitas yang tinggi dan jumlah populasi yang besar. Berdasarkan kedua factor tersebut tingkat produktivitas yang tinggi merupakan factor yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, karena semakin meningkatnya produktivitas yang dihasilkan oleh suatu daerah maka akan terjadi peningkatan dalam memenuhi standar kehidupan. Dalam hal ini Kuznet menekankan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus ada perubahan dan inovasi dalam teknologi terkait dengan tenaga kerja sektor yang

kurang produktif atau sektor pertanian berubah ke sektor yang lebih produktif atau sektor industri manufaktur.

Menurut Boediono (1992) “Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Dalam pertumbuhan ekonomi yang harus ditekankan adalah prosesnya bukan suatu gambaran yang akan terjadi suatu saat. Proses yang dimaksud yaitu aspek dinamis dari suatu perekonomian, bagaimana perekonomian tersebut mengalami perubahan dari waktu ke waktu”.

### 2.2.2 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang berbeda dengan pertumbuhan ekonomi. Perbedaannya yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan per kapita riil secara terus menerus, sedangkan pengertian pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan per kapita riil penduduk secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang disertai adanya perubahan struktur ekonomi dan perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2010).

Tahap pembangunan ekonomi dibagi menjadi lima tahapan yaitu tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, tahap menuju kedewasaan dan tahap konsumsi tinggi.

- Tahap masyarakat tradisional, memiliki ciri masyarakat yang masih berpikiran tradisional, hasil produktivitas sebagian besar berasal dari

sektor pertanian, tingkat produktivitas masih rendah, masih kecilnya ukuran industri manufaktur, perubahan penduduk yang tidak tentu, dan tingkat pendapatan per kapita yang cenderung rendah.

- Tahap prasyarat lepas landas tahap ini merupakan tahap yang dilakukan masyarakat dimana masyarakat untuk mempersiapkan diri mencapai pertumbuhan dengan kekuatan sendiri. Agar tujuan untuk mencapai pertumbuhan dengan kekuatan sendiri hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pembangunan infrastruktur agar dapat menciptakan pasar skala nasional dan memperlancar pendistribusian barang dan jasa. Hal kedua yang dilakukan adalah adanya revolusi teknologi dibidang pertanian agar terjadi peningkatan produktivitas dalam bidang pertanian.
- Tahap lepas landas pada tahap ini pertumbuhan ekonomi yang dimiliki sudah tinggi. Pada tahap ini sudah terjadi revolusi politik, telah melakukan banyak inovasi dan banyaknya terbuka pangsa pasar yang baru.
- Tahap menuju kedewasaan, pada tahap ini pemikiran masyarakatnya sudah mengalami kedewasaan, sudah menggunakan teknologi modern secara efektif pada setiap kegiatan produksinya. Karakteristik masyarakat dalam tahap ini keahlian tenaga kerja berubah dalam hal proporsi tenaga kerja menjadi lebih terampil, peranan manajer yang

profesional yang semakin baik dan mulai munculnya berbagai kritik pada industrialisasi yang dilakukan oleh kaum intelektual.

- Tahap konsumsi tinggi, pada tahap ini kesejahteraan dan konsumsi pada masyarakat mendapatkan perhatian lebih. Dalam tahap ini mempunyai tujuan untuk memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri, menciptakan kesejahteraan untuk negara dengan pemerataan pendapatan melalui pajak progresif dan konsumsi lebih pada barang dan jasa sekunder dan tersier.

### 2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah tolak ukur untuk mencapai pembangunan kualitas manusia yang berdasarkan beberapa bagian standar kualitas hidup. IPM terdiri dari beberapa bagian antara lain angka melek huruf, angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah dapat mengukur pembangunan dibidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dapat dilihat dari besarnya pengeluaran per kapita. Kategori IPM menurut UNDP terdapat 4 kategori yaitu (1).Rendah ketika suatu negara atau wilayah memiliki  $IPM < 50$ , (2).Menengah kebawah ketika suatu negara atau wilayah memiliki angka  $50 < IPM < 66$ , (3).Menengah atas ketika suatu negara atau wilayah memiliki angka  $66 < IPM < 80$  dan (4). Tinggi ketika suatu negara atau wilayah memiliki angka  $IPM > 80$ .

Dalam teori pertumbuhan ekonomi yang baru menekankan pentingnya peranan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan modal manusia dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas. Melakukan investasi pada bidang pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia itu sendiri, Semakin tinggi tingkatan pendidikan seseorang maka pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki semakin baik, sehingga akan memacu peningkatan produktivitas kerjanya.

#### 2.2.4. Pengertian PDRB Per Kapita

Sukmaraga (2011) PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan perekonomian pada suatu wilayah. PDRB merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi disuatu daerah dalam waktu tertentu. PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Besarnya PDRB yang dihasilkan oleh suatu daerah ditentukan berdasarkan potensi sumber daya alam dan factor produksi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Perbedaan PDRB yang diperoleh suatu wilayah dengan wilayah lain yaitu adanya keterbatasan dalam menyediakan factor-faktor produksi. PDRB per kapita dihitung dari PDRB berdasarkan harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah tertentu.

### 2.2.5 Pengertian Ketimpangan

Ketimpangan merupakan kondisi dimana adanya pembangunan ekonomi disuatu wilayah yang tidak merata. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan antara wilayah yaitu:

- Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam, setiap wilayah memiliki kandungan sumber daya alam yang berbeda. Perbedaan ini akan jelas akan mempengaruhi kegiatan ekonomi pada wilayah tersebut. Wilayah yang memiliki sumber daya alam yang banyak dapat memproduksi barang-barang ekonomi dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang rendah. Kondisi seperti ini akan memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dengan cepat. Sedangkan wilayah yang memiliki sumber daya alam rendah akan memproduksi barang-barang ekonomi dengan biaya yang lebih mahal dikarenakan rendahnya sumber daya alam yang dimiliki sehingga harga barang yang dihasilkan akan menjadi mahal dan membuat barang tersebut kalah bersaing dengan barang-barang yang harganya lebih murah.
- Letak Demografis, faktor ini menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan ketimpangan antar wilayah karena apabila terdapat perbedaan letak demografis yang cukup besar antar daerah maka akan terjadi kemungkinan wilayah tersebut akan semakin timpang. Wilayah yang memiliki

letak demografi yang baik akan cenderung menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi, sehingga ini akan memacu peningkatan investasi yang berdampak peningkatan lapangan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut. Sedangkan wilayah yang memiliki letak demografis yang tidak baik ini akan menyebabkan kurangnya produktivitas yang dihasilkan oleh masyarakat karena kurangnya minat investor untuk menanamkan investasi pada wilayah tersebut sehingga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi pada daerah yang bersangkutan.

- Tidak Lancarnya Pendistribusian Barang dan Jasa, dapat memacu peningkatan ketimpangan antar wilayah, wilayah yang pendistribusian barang dan jasanya tidak lancar dapat menyebabkan kelebihan produksi oleh masyarakat tidak dapat dijual ke wilayah lain. Tidak hanya kelebihan produksi yang tidak dapat di jual ke wilayah lain tetapi migrasi yang dilakukan program pemerintah maupun migrasi spontan yang tidak merata dapat menyebabkan jumlah sumber daya manusianya bertambah tetapi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik karena terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan di wilayah tersebut. Ini mengakibatkan ketimpangan antar wilayah akan cenderung meningkat karena kelebihan suatu wilayah tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh daerah yang membutuhkannya, sehingga menyebabkan melambatnya pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.

- “Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah, konsentrasi kegiatan ekonomi pada wilayah tertentu akan mempengaruhi pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat pada wilayah yang terdapat konsentrasi ekonomi yang cukup besar. Konsentrasi kegiatan ekonomi dapat disebabkan” oleh adanya sumberdaya alam yang lebih banyak daripada wilayah lain, meratanya pembangunan infrastruktur juga dapat mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki sumber daya alam lebih banyak daripada wilayah yang memiliki sumber daya alam rendah dan kondisi kependudukan juga dapat mempengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomi karena untuk meningkatkan produktivitas ekonomi memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas.

#### 2.2.6. Pengertian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah kondisi dimana angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali padahal mereka telah menyari pekerjaan secara maksimal atau angkatan kerja yang malas untuk mencari pekerjaan. Semua tenaga kerja akan ditampung oleh perusahaan apabila keahlian tenaga sesuai dengan lapangan pekerjaan yang dibuka dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia seimbang dengan banyaknya jumlah tenaga kerja (Tambunan, 2001). Tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi yang sangat penting setelah faktor produksi sumber daya alam, teknologi dan modal. Tanpa adanya tenaga kerja maka kegiatan produksi



suatu perusahaan tidak akan pernah bisa berjalan. Dalam pembangunan tenaga kerja memiliki peranan yang penting pula yaitu sebagai pelaku pembangunan.

Tingkat Pengangguran Terbuka bukanlah masalah baru yang terjadi dalam ekonomi, masalah ini sudah sejak dulu ada. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi dapat menggambarkan bahwa suatu wilayah atau negara tersebut memiliki masalah ketimpang. Ketika suatu wilayah atau negara memiliki tingkat pengangguran terbuka yang tinggi maka menyebabkan rendahnya pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakatnya sehingga dapat memacu munculnya kemiskinan sehingga dapat menyebabkan suatu wilayah atau negara timpang.

Tenaga kerja atau sumber daya manusia mencakup kemampuan seseorang untuk dapat mampu bekerja dengan baik dalam menghasilkan jasa dan barang ekonomi. Mampu bekerja berarti seseorang tersebut dapat melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan masyarakat yang lain. Kemampuan bekerja secara fisik dapat diukur dengan usia angkatan kerja. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari golongan bekerja dan golongan menganggur atau sedang mencari pekerjaan (Sumarsono, 2009)

## **2.2.7. Hubungan Antara Variable Independen dengan Variable Dependen**

### **2.2.7.1 Hubungan Ketimpangan dengan PDRB**

PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah. Pada suatu wilayah yang memiliki PDRB tinggi maka wilayah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Menurut Kuncoro (1997) pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Tolak ukur keberhasilan pada peningkatan PDRB dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Menurut Simon Kuznet (1995) dalam Kuncoro (2000) mengenai kurva “U” terbalik bahwa mula-mula pembangunan dimulai distribusi pendapatan akan makin tidak merata namun setelah mencapai suatu tingkatan pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata.

### **2.2.7.2 Hubungan Ketimpangan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah kondisi dimana seseorang tidak memiliki pekerjaan padahal telah berusaha untuk mencari pekerjaan dengan maksimal. Sehingga hubungan antara ketimpangan dengan tingkat pengangguran terbuka adalah ketika angka tingkat pengangguran terbuka meningkat maka ketimpangan akan meningkat pula, karena pada saat seseorang tidak memiliki

pekerjaan atau menganggur mereka tidak memberikan kontribusi dalam kegiatan ekonomi atau seseorang tersebut tidak memproduksi sehingga output yang dihasilkan rendah. Maka tingkat pengangguran terbuka secara empiris berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pada penelitian Ulfie (2014) menunjukkan bahwa ketimpangan dengan tingkat pengangguran terbuka diduga berhubungan positif terhadap ketimpangan.

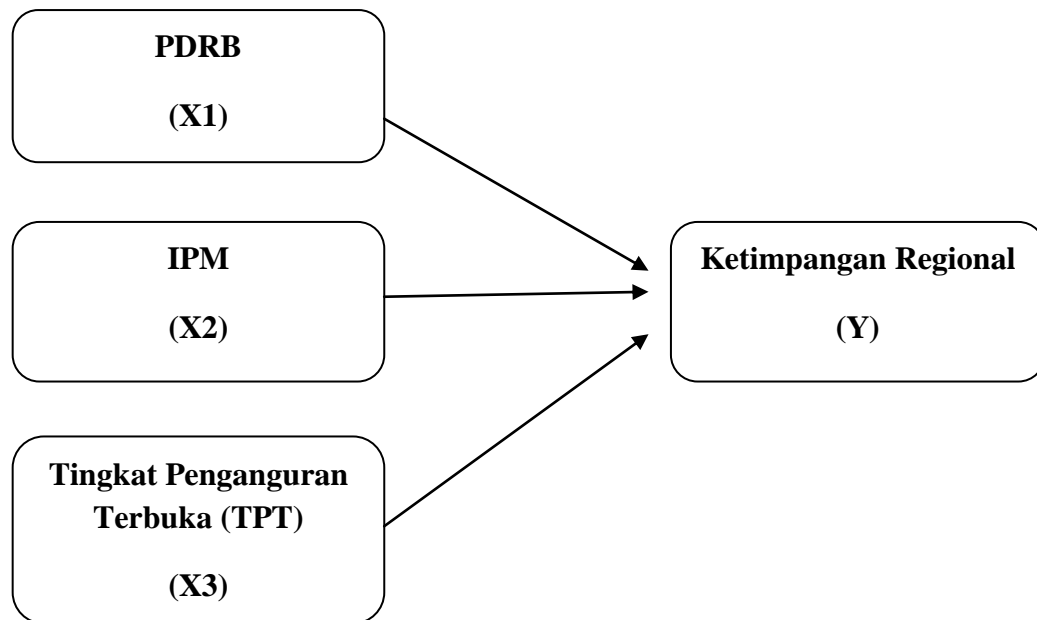
#### 2.2.7.3. Hubungan Ketimpangan dengan IPM

Indeks pembangunan manusia menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Pada hakikatnya IPM memiliki hubungan saling keterkaitan dengan ketimpangan ekonomi. Peran pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan formal seseorang maka semakin baik pula kualitas seseorang tersebut dalam menunjang kegiatan ekonomi (Tarmidzi, 2012). Menurut Becker (Tarmidzi, 2012) Becker mengkaji lebih dalam mengenai peran pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa, semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka

produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal ini tersebut sesuai dengan teori human capital, yaitu bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi ketimpangan pendapatan karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini menganggap pertumbuhan penduduk ditentukan oleh produktivitas perorangan. Maka hubungan ketimpangan dengan IPMberhubunga negatif terhadap ketimpangan.

### 2.2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran maka hubungan antara variable independen (bebas) dengan variable dependen (terikat)



### **2.2.9 Hipotesis**

Berdasarkan Landasan teori di atas maka dapat disusun hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Diduga PDRB berhubungan positif terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat.
- Diduga IPM berhubungan negatif terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat.
- Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka berhubungan positif terhadap ketimpangan pembangunan di Kalimantan Barat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3. Metode Penelitian**

##### **3.1 Variabel Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. Data menggunakan metode regresi data panel yang pencatatan sistematisnya berupa data runtun waktu (*time series*) dan data (*cross-section*) yang berdasarkan tahun 2011-2015. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Ketimpangan dengan metode indeks ketimpangan williamson , kemudian Variabel Independen dalam penelitian ini adalah PDRB per kapita atas harga konstan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2015, IPM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2015 dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2011-2015.

##### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

###### **3.2.1 Variabel Dependen**

Dalam penelitian ini vriabeldependenadalah ketimpangan regional yang merupakan kondisi dimana terjadi ketimpangan antar daerah atau regional yang disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan perbedaan infrastruktur Dalam penelitian ini ketimpangan regional dihitung

menggunakan Indeks Ketimpangan Williamson. Indeks Williamson dapat diukur dari tingkat pertumbuhan PDRB yang terdapat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011-2015.

### 3.2.2 Variabel Independen

#### 3.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menurut BPS adalah Indeks yang diukur dengan memadukan unsur pendidikan, kesehatan dan tingkat pengeluaran per kapita yang disesuaikan. IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia yang berdasarkan bagian dasar kualitas hidup. IPM terdiri dari beberapa bagian antara lain angka melek huruf, angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah dapat mengukur pembangunan dibidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dapat dilihat dari besarnya pengeluaran per kapita.

#### 3.2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi disuatu daerah dalam waktu tertentu. PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Besarnya PDRB yang dihasilkan oleh suatu daerah ditentukan berdasarkan potensi sumber daya alam dan factor produksi yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

### 3.2.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah kondisi dimana seseorang tidak memiliki pekerjaan padahal telah berusaha untuk mencari pekerjaan dengan maksimal. Sehingga hubungan antara ketimpangan dengan tingkat pengangguran terbuka adalah ketika angka tingkat pengangguran terbuka meningkat maka ketimpangan akan meningkat pula, karena pada saat seseorang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur mereka tidak memberikan kontribusi dalam kegiatan ekonomi atau seseorang tersebut tidak memproduksi sehingga output yang dihasilkan rendah.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) antara lain Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011-2015.



### 3.4 Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini model analisis ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah dengan menggunakan Indeks Williamson. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan model REM (*Random Effect Model*) untuk mengetahui apakah variabel independent mempengaruhi variable dependen yang sudah ditentukan.

#### 3.4.1 Metode *Common Effect*

Metode *common effect* merupakan metode yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel yaitu hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Metode ini diasumsikan bahwa perilaku data antara ruang sama dalam berbagai kurun waktu. Model ini persamaan regresinya dalam bentuk linear adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 - \beta_1 X_{1it} - \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

#### 3.4.2 *Fixed Effect Model*

Merupakan pendekatan dimana merupakan salah satu cara untuk memperhatikan unit *cross section* pada model regresi data panel adalah dengan memperoleh nilai intersep yang berbeda-beda pada setiap unit *cross section* tetapi masih mengasumsikan slope koefisien yang tetap. Maka persamaan model ini sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} - u_{it}$$

### 3.4.3 Random Effect Models

Pada model ini diasumsikan  $\alpha_i$  merupakan variable random dengan  $\alpha_0$ , sehingga intersep dapat diasumsikan sebagai  $\alpha_1 = \alpha_i + e_i$ , dimana  $e_i$  merupakan error random yang mempunyai mean 0 dan varians  $e_i$  tidak secara langsung di observasi atau disebut juga variable laten. Persamaan model ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_0 + \beta X_{it} + w_t$$

## 3.5 Pemilihan Model dalam Pengolahan Data

Pemilihan model yang akan digunakan dalam sebuah penelitian sangat perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan statistik. Hal ini ditujukan untuk memperoleh dugaan yang efisien.

### 3.5.1 Uji Chow Test

Uji chowtest dilakukan untuk memilih apakah model yang digunakan *pooledleast square* atau *fixed effect*. Hipotesis dari chow test adalah:

- $H_0$ :  $F \text{ stat} < F \text{ tabel}$ , maka model PLS yang valid digunakan.
- $H_1$ :  $F \text{ stat} > F \text{ tabel}$ , maka model fixed effect yang valid digunakan.

Apabila nilai *chow* statistik atau nilai F statistik lebih kecil daripada nilai F-tabel, maka hipotesis nol diterima. Sehingga model yang akan diterima dan digunakan adalah model PLS, begitu juga sebaliknya.

### 3.5.2 Uji Hausman Test

Uji ini selanjutnya membahas tentang pemilihan metode yang terbaik antara *fixed effect* dan *random effect*. Uji Hausman dilakukan dengan menggunakan alat bantu Eviews. Untuk melakukan uji ini digunakan hipotesis sebagai berikut:

- H0: Model *Random Effect*
- H1: Model *Fixed Effect*

Uji Hausman mengikuti distribusi statistik *chi-square* dengan *degree of freedom* sebanyak k dimana k adalah jumlah variable independen. Ketika nilai statistic hausman lebih kecil dari nilai kritis maka gagal menolak Ho sehingga model yang tepat adalah *Random Effect*.

### 3.5.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik garis regresi dengan datanya atau mengukur presentase total variasi Y yang dijelaskan oleh garis regresi. Semakin mendekati 1 maka semakin baik garis regresinya, karena mampu menjelaskan data aktualnya. Dan begitu pula sebaiknya (Widarjono, 2013).

#### 3.5.4 Uji T (Pengujian variable secara individu)

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikan atau tidak variable independen terhadap variable dependen secara imdividu. Uji ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:

- Jika hipotesis signifikan positif
  - a.  $H_0 : \beta_i \leq 0$
  - b.  $H_1 : \beta_i \geq 0$
- Jika hipotesis signifikan negatif
  - a.  $H_0 : \beta_i \geq 0$
  - b.  $H_1 : \beta_i \leq 0$

Menentukan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) 5%

Kriteria Pengujian:

- Jika nilai Prob. T-statistic  $> 0.05$ , maka  $H_0$  diterima, artinya variable bebas tidak mempengaruhi variable terikat secara signifikan.
- Jika nilai Prob.T-statistic  $< 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya variable bebas mempengaruhi variable terikat secara signifikan.

#### 3.5.5 Uji F (Uji Hipotesis Koefisien Regresi Secara Menyeluruh)

Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikan atau tidak variable-variable independen terhadap variable dependen secara menyeluruh. Apabila nilai F hitung

lebih besar dari nilai F kritis maka variable-variable dependen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variable dependen. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

H1 : Minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol

Dengan membandingkan nilai prob f-stat dengan  $\alpha$  (5%), jika prob f-stat  $< \alpha$  maka menolak  $H_0$ , yang artinya variabel independen secara menyeluruh mempengaruhi variable dependen. Sebaliknya apabila prob f-stat  $> \alpha$  maka gagal menolak  $H_0$  maka variable independen secara menyeluruh tidak mempengaruhi variable dependen.

## **BAB IV**

### **ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi Kalimantan Barat periode tahun 2011 – 2015. Analisis data dilakukan melalui dua tahap analisis yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Analisis deskriptif menjelaskan gambaran seluruh data-variabel penelitian di Kabupaten/kota se propinsi Kalimantan Barat dari tahun 2011– 2015. Sedangkan analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dalam bab sebelumnya

#### **4.1 Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif menjelaskan seberapa besar tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi Kalimantan Barat periode tahun 2011 – 2015. Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan daerah digunakan Indeks Williamson. Menurut Sjafrizal (2008), Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat diukur dengan Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data

dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antarwilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.

Hasil perhitungan Indeks Williamson antar kabupaten/kota di Regional Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Ketimpangan Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat

Kabupaten	Tahun					Rata2
	2011	2012	2013	2014	2015	
Sambas	0.0174	0.016	0.0141	0.0105	0.0078	0.01316
Bengkay	0.0187	0.0191	0.0194	0.0217	0.0253	0.02084
Landak	0.0717	0.0724	0.0738	0.0739	0.0729	0.07294
Pontia	0.0568	0.0594	0.0601	0.0583	0.0558	0.05808
Sanggau	0.0488	0.0404	0.0494	0.0428	0.038	0.04388
Ketap	0.1147	0.1091	0.1032	0.0933	0.0924	0.10254
Sintang	0.0304	0.031	0.0297	0.0288	0.029	0.02978
Kapuas	0.0051	0.0023	0.0004	0.0023	0.0044	0.0029
Sekadau	0.0463	0.0453	0.0441	0.0413	0.0387	0.04314
Melawi	0.0679	0.0676	0.069	0.0696	0.0705	0.06892
Kayong	0.015	0.0153	0.0165	0.0158	0.0164	0.0158
Kubu	0.055	0.0577	0.0595	0.064	0.0703	0.0613

Pont_Kot	0.1765	0.1856	0.1951	0.1988	0.1984	0.19088
Singkaw	0.0428	0.0442	0.045	0.0485	0.0491	0.04592
<b>Rata-rata</b>	<b>0.054793</b>	<b>0.054671</b>	<b>0.055664</b>	<b>0.054971</b>	<b>0.054929</b>	<b>0.055006</b>
	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber : Data Sekunder diolah, 2016

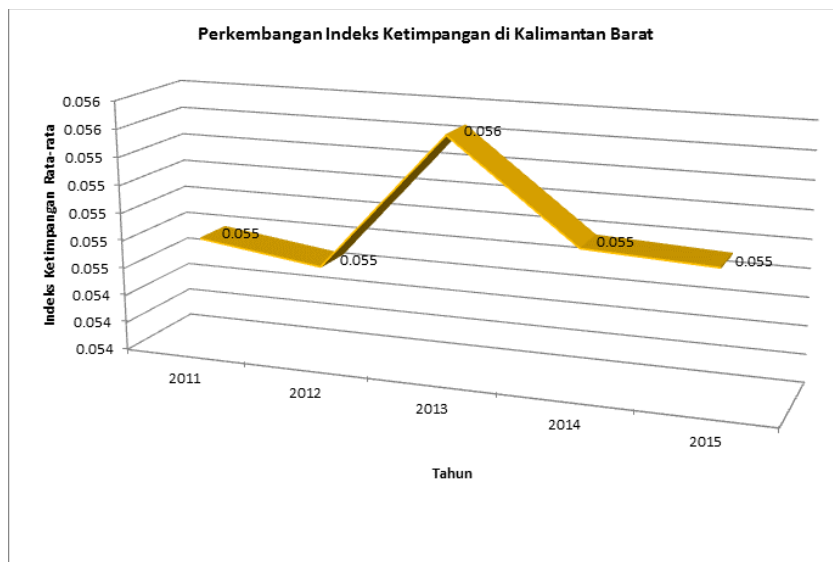
Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai Indeks Williamson pada tahun 2011 – 2015, rata-rata ketimpangan Regional di Kalimantan Barat sebesar 0,055006. Di tahun 2011 nilai indeks kesenjangan Williamson 0,054793, tahun berikutnya (tahun 2012) sedikit turun menjadi 0,054671, tahun 2013 naik menjadi sebesar 0,055664, tahun 2014 turun lagi menjadi sebesar 0,054971, dan menurun lagi tahun 2015 menjadi 0,054929. Secara rata-rata indeks Williamson sebesar 0,055006 menunjukkan bahwa kategori indeks ini berada pada interval 0 - 0,5 yaitu termasuk dalam ketimpangan pendapatan yang rendah.

Secara umum nilai Indeks Ketimpangan Williamson Regional di Kalimantan Barat selama periode 2011 – 2015 mengalami kecenderungan penurunan. Ketimpangan yang terus menurun disebabkan antara lain oleh berkembangnya secara merata kegiatan ekonomi antar wilayah, Alokasi investasi yang sudah merata, tingkat mobilitas faktor produksi yang tinggi antar daerah, pemantaatan Sumber Daya Alam



(SDA) antar wilayah, kondisi geografis antar wilayah serta sudah lancarnya perdagangan antar propinsi.

Indeks Kesenjangan Williamson yang terjadi di Regional di Kalimantan Barat pada tahun 2011 – 2015 menunjukkan bahwa perubahan angka yang cukup kecil dan menunjukkan hasil yang berarti bagi penurunan ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat, bahkan cenderung mengalami penurunan. Grafik kecenderungan ini dapat dilihat pada Grafik 4.1



Gambar 4.1. Grafik Perkembangan Ketimpangan Daerah di Kalimantan Barat Periode 2011 - 2015

Dari grafik nilai Indeks Kesenjangan Williamson di Regional di Kalimantan Barat di atas jika dilihat secara rata-rata Indeks Williamson selama tahun pengamatan 2011 – 2015 mengalami ketimpangan yang cukup rendah dan cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan antar daerah Kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Barat sudah cukup merata. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2011-2015 pemerintah propinsi Kalimantan Barat memberlakukan Otonomi Daerah yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri tanpa ada lagi intervensi dari pemerintah pusat, sehingga masing-masing daerah di Propinsi Kalimantan Barat harus dapat mengembangkan daerahnya sendiri. Namun demikian disisi lain sumber pendapatan yang berasal dari bantuan pemerintah pusat juga cukup besar, melalui DAU dan DAK sehingga pemerintah daerah mampu melakukan pembangunan daerahnya dengan baik.

Suatu daerah harus memiliki kemampuan keuangan atau kapasitas fiskal daerah, seperti: sumber daya alam, potensi daerah, kaadaan alam, dan kemampuan sumber daya manusia tiap-tiap daerah. Hal itu penting sekali karena sangat menentukan pendapatan daerah, jadi setiap daerah harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuanganya sendiri. Di Kabupaten/kota se propinsi Kalimantan Barat telah memiliki kelebihan sendiri-sendiri atas potensi yang dimiliki daerah. Di Pontianak misalnya tumbuh industri-industri pengolahan kayu seperti kayu lapis (plywood), mebel, pabrik karet. Kedua komoditas itu selama ini menjadi

andalan ekspor Kalbar dengan total penerimaan pajak mencapai Rp 1,738 trilyun per tahun. Selain itu komoditas pertanian lainnya yang turut diekspor, seperti kakao, lada, kopi, langsung, durian, serta dari sub-sektor perikanan, antara lain, ikan dan udang. Prospek ekonomi ini bertambah cerah setelah sejak tahun 1980-an mulai dikembangkan perkebunan kelapa sawit besar-besaran dengan menggunakan pola perkebunan inti rakyat (PIR) yang kini menjadi andalan mata pencaharian Rakyat di Kalimantan Barat.

#### **4.2. Pemilihan Model Regresi**

Pemilihan model yang digunakan dalam sebuah penelitian perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan statistik. Hal ini ditunjukkan untuk memperoleh dugaan yang efisien. Dalam penelitian ini ada 3 model regresi yaitu model *Common*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Untuk itu, perlu dilihat masing-masing hasil estimasi dari berbagai model panel data sebagai berikut :

**Tabel 4.2. Hasil Estimasi Model Common**

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.112509	0.087518	-1.285545	0.2031
PDRB?	-0.046994	0.011782	-3.988706	0.0002
IPM?	0.008046	0.000291	27.68727	0.0000
TPT?	0.000818	0.000645	1.268779	0.2090

Weighted Statistics			
R-squared	0.719870	Mean dependent var	0.092719
Adjusted R-squared	0.707137	S.D. dependent var	0.101148
S.E. of regression	0.030650	Sum squared resid	0.062000
F-statistic	56.53491	Durbin-Watson stat	0.239237
Prob(F-statistic)	0.000000		

**Tabel 4.3. Hasil Estimasi Model *Fixed Effect***

White cross-section standard errors &amp; covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.348509	0.138040	-9.769004	0.0000
PDRB?	0.234787	0.023768	9.878241	0.0000
IPM?	-0.004874	0.000578	-8.426675	0.0000
TPT?	-1.19E-05	0.000370	-0.032284	0.9744
Fixed Effects (Cross)				
SAMBAS—C	-0.046692			
BENGKAY—C	-0.025854			
LANDAK—C	0.043032			
PONTIA—C	0.020840			
SANGGAU—C	-0.037058			
KETAP—C	0.011376			
SINTANG—C	-0.022599			
KAPUAS—C	-0.061604			
SEKADAU—C	-0.002923			
MELAWI—C	0.047240			
KAYONG—C	-0.057442			
KUBU—C	-0.012345			
PONT_KOT—C	0.150222			
SINGKAW—C	-0.006193			

**Tabel 4.4. Hasil Estimasi Model *Random Effect***

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.087655	0.348760	-3.118635	0.0027
PDRB?	0.192067	0.059024	3.254057	0.0018
IPM?	-0.004081	0.001414	-2.887373	0.0052
TPT?	0.000115	0.000470	0.245505	0.8068

Random Effects (Cross)

SAMBAS—C	-0.045753
BENGKAY—C	-0.027170
LANDAK—C	0.038282
PONTIA—C	0.017226
SANGGAU—C	-0.032273
KETAP—C	0.017903
SINTANG—C	-0.022957
KAPUAS—C	-0.059627
SEKADAU—C	-0.004490
MELAWI—C	0.041058
KAYONG—C	-0.054553
KUBU—C	-0.009212
PONT_KOT—C	0.148018
SINGKAW—C	-0.006452

Sumber : Output EViews 9.0

Dari ketiga model, selanjutnya dipilih model yang paling baik yaitu dengan uji Chow dan Uji Hausman.

**a) Chow Test (uji F-statistik)**

Uji ini digunakan untuk memilih model yang akan digunakan antara model estimasi *Common Effect* atau model estimasi *Fixed Effect*, dengan uji hipotesis :

- 1) Ho: memilih menggunakan model estimasi *Common Effect*.
- 2) H1: memilih menggunakan model estimasi *Fixed Effect*.

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat *p-value* apa bila signifikan (kurang dari 5%) maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect*, apabila *p-value* tidak signifikan (lebih dari 5 %) maka model yang digunakan adalah model estimasi *common effect*.

**Tabel 4.5. Hasil Uji signifikansi *Fixed Effect* dan *Common Effect* (Chow Test)**

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	470.693681	(13,53)	0.0000

Sumber: Olahan data Eviews 9.0

Nilai distribusi statistik *F test* dari perhitungan menggunakan *Eviews 9.0* adalah sebesar 470.69368 dengan probabilitas 0.000 (lebih dari 5 %), sehingga statistik Ho ditolak dan menerima H1, menurut hasil estimasi ini model yang tepat digunakan adalah model estimasi *Fixed Effect Model*.

## b) Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk memilih model yang akan digunakan antara model estimasi *Fixed Effect* atau model estimasi *Random Effect*, dengan uji hipotesis :

- 1) Ho: memilih menggunakan model estimasi *Random Effect*.
- 2) H1: memilih menggunakan model estimasi *Fixed Effect*.

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat *p-value* apa bila signifikan (kurang dari 5%) maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect*, apabila *p-value* tidak signifikan (lebih dari 5 %) maka model yang digunakan adalah model estimasi *Random effect*.

**Tabel 4.6. Hasil Uji signifikansi *Fixed Effect* dan *Random Effect* (*Hausman Test*)**

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	23.231323	3	0.0000

Sumber: Olahan data Eviews 9.0

Nilai distribusi statistik *Chi Square test* dari perhitungan menggunakan *Eviews 9.0* adalah sebesar 23,2313 dengan probabilitas 0.0000 (lebih kecil 5 %), sehingga statistik Ho ditolak dan menerima H1, menurut hasil estimasi ini model yang tepat digunakan adalah model estimasi *Fixed Effect Model*.



### 4.3 Analisis Regresi Linier Terpilih (*Fixed Effect*)

Estimasi ini merupakan teknik mengestimasi data panel menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep antar variabel namun intersep waktunya sama. Disamping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar variabel dan antar waktu. Berikut estimasi dari *Fixed Effect*. *Fixed Effect* merupakan bentuk model persamaan untuk analisis Pengaruh PDRB, IPM dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi Kalimantan Barat periode tahun 2011 – 2015,

Berdasarkan regresi *Fixed Effect* dengan menggunakan bantuan program komputer EViews 9 diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

**Tabel 4.7. Hasil Estimasi Regresi**

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.348509	0.138040	-9.769004	0.0000
PDRB?	0.234787	0.023768	9.878241	0.0000
IPM?	-0.004874	0.000578	-8.426675	0.0000
TPT?	-1.19E-05	0.000370	-0.032284	0.9744
Fixed Effects (Cross)				
SAMBAS—C	-0.046692			

BENGKAY—C	-0.025854
LANDAK—C	0.043032
PONTIA—C	0.020840
SANGGAU—C	-0.037058
KETAP—C	0.011376
SINTANG—C	-0.022599
KAPUAS—C	-0.061604
SEKADAU—C	-0.002923
MELAWI—C	0.047240
KAYONG—C	-0.057442
KUBU—C	-0.012345
PONT_KOT—C	0.150222
SINGKAW—C	-0.006193

---



---

Effects Specification

---



---

Cross-section fixed (dummy variables)

---



---

Weighted Statistics

---



---

R-squared	0.995370	Mean dependent var	0.076851
Adjusted R-squared	0.993973	S.D. dependent var	0.071677
S.E. of regression	0.003790	Sum squared resid	0.000761
F-statistic	712.2001	Durbin-Watson stat	1.347150
Prob(F-statistic)	0.000000		

---



---

Dapat dilihat dari hasil model regresi dan hasil linier berganda diatas, maka dapat ditarik persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:

$$Y = -1,348509 + 0,234787 X_1 - 0,004874 X_2 - 0,0000119 X_3$$

Berdasarkan berbagai parameter dalam persamaan regresi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan di Provinsi Kalimantan Barat, maka dapat diberikan interpretasi sebagai berikut:

**a) Konstanta (Koefisien a)**

Jika dilihat dari konstanta per-Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa koefisien Fixed Effect di Kabupaten Kapuas, Kayong Utara, dan Sambas memiliki nilai konstanta paling kecil dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Kalimantan Barat, dikarenakan di kabupaten tersebut memiliki kawasan industri. Kabupaten Kapuas, kayong utara dan Sambas menjadi kawasan konsentrasi untuk industri bauksit, kelapa sawit, karet dan pematangan kayu. Seperti di kawasan kabupaten kayong utara terdapat industri bauksit Usaha Pertambangan Bahan Galian Bauksit seluas 1.832 ha, dengan rencana kapasitas produksi 200.000 ton/ bulan sedangkan sebagian besar penduduk di kabupaten kapuas, kayong utara dan sambas masyarakatnya bekerja pada sektor perkebunan, kehutanan dan nelayan sehingga itu menyebabkan kabupaten kapuas, kayong utara dan sambas memiliki ketimpangan yang cukup tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Barat.

**b) Koefisien PDRB Per Kapita ( $b_1$ )**

PDRB Per Kapita( $X_1$ ) terhadap tingkat ketimpangan memiliki pengaruh positif dengan koefisien regresi sebesar 0.06164 yang berarti ketika PDRB Per Kapita meningkat/semakin baik sebesar 1 tahun, maka tingkat ketimpangan di Provinsi Kalimantan Barat tersebut akan meningkat 0.006164% dengan asumsi bahwa variabel IPM dan Tingkat Pengangguran Terbuka dalam kondisi konstan. Dengan hasil yang menunjukkan adanya pengaruh positif, yang artinya bahwa hubungan antara PDRB Per Kapita dan tingkat ketimpangan memiliki hubungan yang searah. Ketika PDRB Per Kapita meningkat yang akan menyebabkan tingkat ketimpangan juga meningkat, begitu juga dengan sebaliknya jika PDRB Per Kapita menurun maka tingkat kemiskinan menurun.

**c) Koefisien IPM( $b_2$ )**

IPM( $X_2$ ) terhadap tingkat ketimpangan memiliki pengaruh negatif dengan koefisien regresi sebesar -0,004874 yang berarti ketika IPM meningkat sebesar 1 persen, maka tingkat ketimpangan Provinsi Kalimantan Barat tersebut akan menurun sebesar 0.004874 persen dengan asumsi bahwa variabel PDRB dan Tingkat Pengangguran Terbuka dalam keadaan konstan. Dengan hasil yang menunjukkan adanya pengaruh negatif, yang berarti antara variabel IPM dengan tingkat ketimpangan memiliki hubungan yang berlawanan. Karena ketika IPM semakin meningkat yang akan menyebabkan tingkat ketimpangan berkurang/menurun, begitu juga dengan sebaliknya jika IPM semakin menurun maka tingkat ketimpangan akan meningkat.

#### **d) Koefisien Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ( $b_3$ )**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)( $X_3$ ) terhadap tingkat ketimpangan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan di Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan sebagian besar masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat bekerja pada sektor informal sehingga menyebabkan jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh terhadap ketimpangan.

#### **4.3.1. Uji t (Pengujian secara parsial)**

##### **1. Pengaruh PDRB Terhadap Ketimpangan Regional**

PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat dilihat dari hasil T-test (uji parsial) sebesar 9,8782 dan probabilitas sebesar 0,0000. Angka tersebut menunjukkan bahwa probabilitas  $< 0,05$  yaitu  $0,0019 < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi Kalimantan Barat.

Hasil ini sesuai dengan hipotesis bahwa PDRB memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Hal ini sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Angelia (2010) meneliti dengan judul penelitian analisis ketimpangan

pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta tahun 1995-2008 mengatakan bahwa hubungan positif antara PDRB per kapita dengan ketimpangan wilayah disebabkan karena kenaikan pendapatan per kapita masyarakat DKI Jakarta belum terjadi secara merata. Negara-Negara berkembang dalam perekonomian lebih menekankan pada pembangunan modal dibandingkan pengguna tenaga kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja.

## **2. Pengaruh IPM terhadap ketimpangan Regional**

IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat dilihat dari  $t$  statistik = -8.426675 dan probabilitas sebesar 0,0000. Angka tersebut menunjukkan bahwa probabilitas < 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel IPM berpengaruh signifikan negatif terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan “Diduga IPM berhubungan negatif terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat” **didukung**. Perbaikan pendidikan dan perbaikan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya memberikan dampak terhadap penurunan ketimpangan yang terjadi di Provinsi tersebut. Ketika terjadi perbaikan pendidikan pada provinsi tersebut maka

akan memperbaiki skill yang dimiliki oleh sumber daya manusia di daerah itu. Sehingga sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan kerja yang lebih baik akan menghasilkan output produksi yang lebih baik lagi dan mampu lebih produktif. Ketika sumber daya manusia lebih produktif maka akan menghasilkan output yang lebih pula dan akan memberikan dampak mengurangi tingkat ketimpangan di Provinsi Kalimantan Barat.

### **3. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Regional**

Tingkat Pengangguran Terbuka mempunyai pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat dilihat dari t-statistik = -0,032284 dan probabilitas sebesar 0,9744. Angka tersebut menunjukkan bahwa probabilitas  $>0,05$ . Hal ini berarti bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan “Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka berhubungan positif terhadap ketimpangan ekonomi di Kalimantan Barat” **tidak didukung**. Hipotesis tidak didukung dengan alasan sebagian besar masyarakat Provinsi Kalimantan Barat bekerja pada sektor informal atau yang berarti sebagian besar masyarakat Provinsi Kalimantan bekerja pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Tercatat sebesar

5,71% masyarakat Kalimantan Barat bekerja pada sektor pertanian atau sekitar 1,2 juta orang, sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 15,72 persen atau 362 ribu orang. Sedangkan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 14,03 persen atau 323 ribu orang.

#### 4.2.2. Uji F (Uji Serentak)

Untuk mengetahui apakah variable PDRB, IPM dan Tingkat Pengangguran Terbukasecara bersama-sama mempengaruhi ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat digunakan F-test

Adapun langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesa

$H_0 : x_1 = x_2 = x_3 = 0$  artinya variabel bebas secara serempak tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas.

$H_a : x_1 \neq x_2 \neq x_3 \neq 0$ : artinya variabel bebas secara serempak berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas.

2. Dengan menggunakan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 0,05

3. Kriteria pengujian :

$H_0$  diterima apabila: Sig F > 0,05

$H_0$  ditolak apabila : Sig F  $\leq$  0,05



4. Hasil perhitungan komputer diperoleh F hitung = 712,2001 dan sig sebesar 0,0000

5. Kesimpulan:

Berdasarkan hasil uji statistik di atas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar  $0,0000 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti variabel PDRB, IPM dan Tingkat Pengangguran secara serempak berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi Kalimantan Barat.

#### **4.2.3. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Dari hasil regresi didapat nilai  $R^2$  sebesar 0,995370. Hal ini menggambarkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama mampu memberi penjelasan mengenai variabel dependen sebesar 99,53%. Adapun 0,47% lagi dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model atau dijelaskan dalam *term of error* ( e ).

#### 4.2.4. Analisis Hasil Regresi

##### 4.2.4.1 Interpretasi Koefisien Fixed Effect Model

**Tabel 4.8**

**Interpretasi Koefisien Fixed Effect**

C (Koefisien)	-1.348504
PDRB?	0.234787
IPM?	-0.004874
TPT?	-0.001905
Fixed Effects (Cross)	
SMBS--C	-0.046692
BKY--C	-0.02584
LNDK--C	0.043032
PTK--C	0.020840
SNGGAUC	-0.037058
Sintang--C	-0.022599
KTP--C	0.011376
KH--C	-0.061604
SKDAU--C	-0.002923
MLWI--C	0.047240
KU--C	-0.057442
KR--C	-0.012345
KOTAPTK--C	0.150222
KOTASKW--C	-0.006193

Dari tabel di atas terlihat masing-masing Kabupaten/Kota memiliki tingkat koefisien *fixed effect* yang berbeda-beda antara satu sama lain. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa variabel PDRB, IPM dan Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh yang berbeda terhadap ketimpangan di tiap-tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

### 1. Sambas

Jika dilihat dari Tabel 4.8, nilai koefisien adalah -1.348504 dan nilai koefisien fixed effect yang dimiliki Kabupaten Sambas (SMBS--C) sebesar -0.046692, maka hal tersebut ditemukan hasil nilai koefisien Kabupaten Sambas adalah -1.395196.

### 2. Bengkayang

Jika dilihat dari Tabel 4.8, nilai koefisien adalah -1.348504 dan nilai koefisien fixed effect yang dimiliki Kabupaten Bengkayang (BKY--C) sebesar -0.025484, maka hal tersebut ditemukan hasil nilai koefisien Kabupaten Bengkayang adalah -1.373988.

### 3. Landak

Jika dilihat dari Tabel 4.8, nilai koefisien adalah -1.348504 dan nilai koefisien fixed effect yang dimiliki Kabupaten Landak (LNDK--C) sebesar 0.043032, maka hal tersebut ditemukan hasil nilai koefisien Kabupaten Landak adalah -1.391536.

#### 4. Pontianak

Jika dilihat dari Tabel 4.8, nilai koefisien adalah -1.348504 dan nilai koefisien fixed effect yang dimiliki Kabupaten Pontianak (PNTK--C) sebesar 0.020840, maka hal tersebut ditemukan hasil nilai koefisien Kabupaten Pontianak adalah -1.369344.

#### 5. Sanggau

Jika dilihat dari Tabel 4.8, nilai koefisien adalah -1.348504 dan nilai koefisien fixed effect yang dimiliki Kabupaten Sanggau (Sanggau--C) sebesar -0.037058, maka hal tersebut ditemukan hasil nilai koefisien Kabupaten Sanggau adalah -1.385562.

#### 6. Ketapang

Jika dilihat dari Tabel 4.8, nilai koefisien adalah -1.348504 dan nilai koefisien fixed effect yang dimiliki Kabupaten Ketapang (KTPNG--C) sebesar 0.011376, maka hal tersebut ditemukan hasil nilai koefisien Kabupaten Ketapang adalah -1.35988.

## 7. Kapuas Hulu

Jika dilihat dari Tabel 4.8, nilai koefisien adalah -1.348504 dan nilai koefisien fixed effect yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu (KH--C) sebesar -0.061604, maka hal tersebut ditemukan hasil nilai koefisien Kabupaten Kapuas Hulu adalah -1.410108.

## 8. Sekadau

Jika dilihat dari Tabel 4.8, nilai koefisien adalah -1.348504 dan nilai koefisien fixed effect yang dimiliki Kabupaten Sekadau (SKDAU--C) sebesar -0.002923, maka hal tersebut ditemukan hasil nilai koefisien Kabupaten Sekadau adalah -1.351427.

## 9. Melawi

Jika dilihat dari Tabel 4.8, nilai koefisien adalah -1.348504 dan nilai koefisien fixed effect yang dimiliki Kabupaten Melawi (MLWI--C) sebesar 0.047240, maka hal tersebut ditemukan hasil nilai koefisien Kabupaten Melawi adalah -1.395744.

#### 10. Kayong Utara

Jika dilihat dari Tabel 4.8, nilai koefisien adalah -1.348504 dan nilai koefisien fixed effect yang dimiliki Kabupaten Kayong Utara (KU--C) sebesar -0.057442, maka hal tersebut ditemukan hasil nilai koefisien Kabupaten Kayong Utara adalah -1.405946.

#### 11. Kubu Raya

Jika dilihat dari Tabel 4.8, nilai koefisien adalah -1.348504 dan nilai koefisien fixed effect yang dimiliki Kabupaten Kubu Raya (KR--C) sebesar -0.012345, maka hal tersebut ditemukan hasil nilai koefisien Kabupaten Kubu Raya adalah -1.360849.

#### 12. Kota Pontianak

Jika dilihat dari Tabel 4.8, nilai koefisien adalah -1.348504 dan nilai koefisien fixed effect yang dimiliki Kota Pontianak (KTPNTK--C) sebesar 0.150222, maka hal tersebut ditemukan hasil nilai koefisien Kota Pontianak adalah -1.408726.

### 13. Sintang

Jika dilihat dari Tabel 4.8, nilai koefisien adalah -1.348504 dan nilai koefisien fixed effect yang dimiliki Kabupaten Sintang (SNTNG--C) sebesar -0.006193, maka hal tersebut ditemukan hasil nilai koefisien Kabupaten Sintang adalah -1.354697.

### 14. Kota Singkawang

Jika dilihat dari Tabel 4.8, nilai koefisien adalah -1.348504 dan nilai koefisien fixed effect yang dimiliki Kota Singkawang (SKW--C) sebesar -0.0022599, maka hal tersebut ditemukan hasil nilai koefisien Kota Singkawang adalah -1.3507639.

Dari hasil analisis diatas, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki nilai koefisien terbesar diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, yang memiliki nilai koefisien -1.410108. Di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat industri Bauksit Usaha Pertambangan Bahan Galian Bauksit seluas 1.832 ha, dengan rencana kapasitas produksi 200.000 ton/ bulan dan luas rencana operasi produksi  $\pm$  1.313 Ha yang terletak di Desa Matan Jaya, kabupaten Kapuas Utara sedangkan sebagian besar masyarakat asli masih bermata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan, Kabupaten Sintang memiliki nilai koefisien terkecil diantara

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, yang memiliki nilai koefisien  $-1.3507639$ . Ketimpangan di kabupaten sintang rendah dikarekan sebgaiian besar masyarakat di kabupaten sintang bermata pencaharian sebagai nelayan sehingga tidak ada ketimpangan pendapatan antar mayarakatnya.

#### **4.4 Pembahasan**

##### **4.4.1. Pengaruh PDRB terhadap ketimpangan Daerah**

Hasil penelitian menemukan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi Kalimantan Barat. Hal ini berarti semakin tinggi PDRB suatu daerah maka akan semakin meningkatkan ketimpangan daerah.

PDRB baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah (Kuncoro dan Mudrajat 2004). Hasil penelitian Mopangga (2011) menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan arti kata bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di suatu daerah akan tetapi tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah lain maka akan menyebabkan ketimpangan pembangunan menjadi semakin tinggi, hal ini



terjadi karena pada awal awal pembangunan pelaku ekonomi suka berinvestasi pada daerah - daerah yang relatif maju sebab infrastruktur lengkap, banyak tenaga kerja yang terlatih, peluang bisnis tersedia sehingga daerah yang tadinya juga sudah maju akan semakin maju dan keadaan ini akan mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi daerah maju.

#### **4.4.2. Pengaruh IPM terhadap ketimpangan Daerah**

Hasil penelitian penelitian menemukan IPM berpengaruh secara signifikan negatif terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat. Hal ini semakin besar IPM akan menurunkan ketimpangan yang terjadi antar daerah di propinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Mopangga (2011) yang menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan daerah. Semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan Teori Human Capital yaitu bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi disparitas pendapatan. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yosi, dkk (2013) bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

#### **4.4.3. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbukaterhadap Ketimpangan Daerah**

Hasil pengujian hipotesis ketiga menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan pendapatan pada

pemerintah daerah kota/kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat. Hal ini berarti besar kecilnya tingkat pengangguran belum dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi Kalimantan Barat.

Selain itu menurut Harun dan Maski (2013) menyatakan bahwa dari Dari segi tenaga kerja, perbedaan tingkat upah daerah maju dengan daerah tertinggal akan menimbulkan perpindahan tenaga kerja dari daerah tertinggal menuju ke daerah maju guna mencari pendapatan yang lebih tinggi, dengan demikian daerah yang tertinggal akan kehilangan tenaga kerjanya. Hal ini terbukti dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh banyak daerah maju guna membendung arus urbanisasi tidak berhasil. Dari segi keterampilan dan teknologi, pada daerah maju dengan begitu tinggi tingkat persaingan yang terjadi mendorong masyarakat di daerah tersebut untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan teknologi yang akan mendukung kegiatan ekonomi pelaku usaha sehingga akan lebih unggul dibandingkan dengan pelaku usaha yang lain, kemudian pelaku usaha yang tertinggal secara otomatis tidak ingin kalah dalam persaingan sehingga mencari cara agar dapat meningkatkan keterampilan dan teknologinya, dan kondisi ini berlangsung terus menerus. Sedangkan pada daerah yang tertinggal akan berlangsung kondisi yang stagnasi, dengan pola pikir yang tidak mau menerima perubahan bukan tidak mungkin daerah tersebut akan mengalami kemunduran.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menemukan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah di Propinsi Kalimantan Barat. Hal ini berarti semakin tinggi PDRB suatu daerah maka akan semakin meningkatkan ketimpangan daerah.
2. Hasil penelitian menemukan IPM berpengaruh negatif secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah di Propinsi Kalimantan Barat. Hal ini berarti semakin tinggi IPM suatu daerah maka ketimpangan regional akan semakin menurun.
3. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat. Hal ini berarti besar kecilnya tingkat pengangguran daerah belum mampu meningkatkan ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi Kalimantan Barat.

## 5.2 Implikasi

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu:

1. Untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan maka saran yang dapat diberikan hendaknya pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya pemerintah daerah diharapkan mampu mengarahkan pengembangan infrastruktur kepada kabupaten-kabupaten yang selama ini tingkat pembangunannya masih tertinggal dengan mengalokasikan pengeluaran / belanja daerah yang lebih besar.
2. Kedua, pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan kualitas tenaga kerja di masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Barat, sehingga mampu merumuskan kebijakan untuk merangsang dunia usaha agar peluang usaha semakin terbuka sehingga kebutuhan akan tenaga kerja bertambah dan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat akan semakin berkurang seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini penting karena pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan daerah.
3. Ketiga hendaknya pemerintah daerah mampu meningkatkan pendidikan masyarakat, dengan mensukseskan program pendidikan dasar dan menengah 12 tahun, karena terbukti bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan regional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Licolin.1997. *Ekonomi Pembangunan* ,STIE YKPN , Yogyakarta
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta.
- Asih, Widi.(2010). “*Aanalisis Ketimpangan Dalam Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan Di Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013*”. Skripsi (dipublikasikan) Program Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat“ *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usahatahun 2011-2015*“.
- 
- “*IPM Metode Baru Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2015*”.
- Dhyatmika, Ketut Wahyu. (2013). “ *Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran*”.Skripsi (dipublikasikan). Program Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah.
- Ginting, Ari. (2014) “*Analisis Ketimpangan Pembangunan di Indonesia*” Kajian Vol 20.
- Jonaidi, Ari. (2012)“*Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia*” [Skripsi] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.

- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPPAMP YKPN, Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kuznets, S. 1996. *Modern Economic Growth*. Yale University Press.
- Mopangga, Herwin. (2011) “ *Analisis Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo tahun 2001-2008*” Jurnal Trikonomika, Vol. 10, nomor 1, hal 40-51. Universitas Negeri Gorontalo.
- Saleh, Samsubar. 2002. *Faktor-faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional di Indonesia*.
- Sinaga,(2010) “*Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota dan Faktor-faktor yang mempengaruhi: studi kasus Provinsi Sumatra selatan (2004-2007)*”[Skripsi] Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*, LPFE UI, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. (2004). *Makroekonomi modern*, Edisi Ketiga. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Todaro, Michael, P. (2000). “*Pembangunan Ekonomi di Dunia Ke Tiga*”.Edisi ke Tujuh.

## LAMPIRAN

### Data Penelitian

Tahun	Kabupaten/Kota	Y_IW	X1_PDRB perkapita	X2_IPM	X3_TPT
2011	Kab Sambas	0,0174	17.995.248,92	60,57	2,99
2012	Kab Sambas	0,016	18.810.634,32	61,53	3,11
2013	Kab Sambas	0,0141	19.720.691,13	62,47	3,03
2014	Kab Sambas	0,0105	20.613.364,89	63,28	3,7
2015	Kab Sambas	0,0078	21.465.244,68	64,14	4,85
2011	Kab Bengkayang	0,0187	17.382.516,23	62,94	3,32
2012	Kab Bengkayang	0,0191	18.058.265,50	63,42	3,3
2013	Kab Bengkayang	0,0194	18.792.801,30	63,99	2,3
2014	Kab Bengkayang	0,0217	19.204.696,40	64,4	3,74
2015	Kab Bengkayang	0,0253	19.484.689,34	64,65	3,15
2011	Kab Landak	0,0717	14.011.595,71	61,67	3,18
2012	Kab Landak	0,0724	14.528.598,65	62,38	4,8
2013	Kab Landak	0,0738	15.037.272,66	62,72	3,24
2014	Kab Landak	0,0739	15.537.069,88	63,59	3,43
2015	Kab Landak	0,0729	16.115.828,54	64,12	5,81
2011	Kab Pontianak	0,0568	14.304.240,22	59,95	3,35
2012	Kab Pontianak	0,0594	14.656.781,76	60,75	4,67
2013	Kab Pontianak	0,0601	15.213.412,11	62,09	5,66
2014	Kab Pontianak	0,0583	15.893.564,03	62,78	5,57
2015	Kab Pontianak	0,0558	16.634.061,61	63,37	7,12
2011	Kab Sanggau	0,0488	22.021.662,24	60,96	3,27
2012	Kab Sanggau	0,0404	22.958.874,08	61,39	1,39
2013	Kab Sanggau	0,0494	23.930.255,03	61,72	0,78
2014	Kab Sanggau	0,0428	24.270.802,70	62,06	3,25
2015	Kab Sanggau	0,038	24.719.703,61	63,05	5,13
2011	Kab Ketapang	0,1147	25.947.019,32	61,47	3,7

2012	Kab Ketapang	0,1091	26.638.394,80	62,04	1,95
2013	Kab Ketapang	0,1032	27.375.426,66	62,85	4,7
2014	Kab Ketapang	0,0933	27.616.785,39	63,27	2,06
2015	Kab Ketapang	0,0924	28.423.374,76	64,03	4,29
2011	Kab Sintang	0,0304	16.975.393,20	60,8	3,38
2012	Kab Sintang	0,031	17.631.170,04	61,66	2,05
2013	Kab Sintang	0,0297	18.472.483,74	62,64	2,24
2014	Kab Sintang	0,0288	19.159.012,17	63,19	3,06
2015	Kab Sintang	0,029	19.767.304,34	64,18	2,48
2011	Kab Kapuas Hulu	0,0051	19.409.416,68	60,83	2,5
2012	Kab Kapuas Hulu	0,0023	19.959.325,70	61,85	1,58
2013	Kab Kapuas Hulu	0,0004	20.629.396,90	62,23	2,09
2014	Kab Kapuas Hulu	0,0023	21.068.859,37	62,9	2,02
2015	Kab Kapuas Hulu	0,0044	21.550.904,85	63,73	3
2011	Kab Sekadau	0,0463	14.648.249,90	59,76	2,93
2012	Kab Sekadau	0,0453	15.336.308,33	60,14	0,6
2013	Kab Sekadau	0,0441	16.100.388,78	61,02	1,44
2014	Kab Sekadau	0,0413	16.925.260,46	61,98	0,31
2015	Kab Sekadau	0,0387	17.750.568,10	62,34	2,97
2011	Kab Melawi	0,0679	12.590.328,26	61,18	3,08
2012	Kab Melawi	0,0676	13.144.148,09	61,58	2,9
2013	Kab Melawi	0,069	13.550.704,29	62,27	3,99
2014	Kab Melawi	0,0696	13.952.260,46	62,89	2,46
2015	Kab Melawi	0,0705	14.320.309,55	63,78	3,03
2011	Kab Kayong Utara	0,015	17.055.323,76	56,58	2,56
2012	Kab Kayong Utara	0,0153	17.707.434,04	57,53	6,96
2013	Kab Kayong Utara	0,0165	18.301.456,31	57,92	4,66
2014	Kab Kayong Utara	0,0158	19.006.972,79	58,52	4,08
2015	Kab Kayong Utara	0,0164	19.547.319,58	60,09	3,76
2011	Kab Kubu Raya	0,055	22.071.815,93	62,56	4,52
2012	Kab Kubu Raya	0,0577	23.132.334,22	63,42	6,06
2013	Kab Kubu Raya	0,0595	24.224.554,05	63,94	9,26



2014	Kab Kubu Raya	0,064	25.313.118,27	64,52	6,18
2015	Kab Kubu Raya	0,0703	26.561.208,13	65,02	6,11
2011	Kota Pontianak	0,1765	28.406.790,06	75,08	7,26
2012	Kota Pontianak	0,1856	30.065.256,54	75,55	5,35
2013	Kota Pontianak	0,1951	31.890.035,24	75,98	6,12
2014	Kota Pontianak	0,1988	33.166.588,93	76,63	7,05
2015	Kota Pontianak	0,1984	34.226.641,64	77,52	9,44
2011	Kota Singkawang	0,0428	22.914.286,83	67,5	5,34
2012	Kota Singkawang	0,0442	23.978.543,22	68,54	5,75
2013	Kota Singkawang	0,045	25.058.491,68	69,13	4,59
2014	Kota Singkawang	0,0485	26.268.219,16	69,84	8,22
2015	Kota Singkawang	0,0491	27.164.851,78	70,03	6,12

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan:

PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)

Indeks Pembangunan Manusia (Persen)

Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)